

GENERASI MILENIAL

Diskursus Teologi, Pendidikan,
Dinamika Psikologis dan Kelekatan pada Agama
di Era Banjir Informasi

Sejarah itu dimulai pada 2018, saat para sarjana lintas disiplin dan latar belakang agama berkumpul di kampus IAKN Manado. Dalam simposium selama dua hari itu semua menyadari bahwa kita merupakan bangsa dengan penganut agama yang besar. Di dalam poster penduduk Indonesia pada 2018, proporsi generasi milenial sangat besar. Menyadari hal itu, penting bagi para sarjana agama melihat anatomi generasi milenial itu. Banyak dimensi yang menarik untuk dikupas. Buku ini tidak berpretensi menjawab semua masalah itu, namun sekedar memberi kontribusi sekeadarnya. Guna memudahkan pembaca, buku ini dibagi menjadi empat bagian besar: diskursus agama dan teologi, pendidikan, psikologi dan konseling, musik serta gaya hidup.

Bagi pembaca ini merupakan bentuk sapaan dengan kadar akademik-intelektual. Berbagai gagasan dipintal dalam bentuk buku. Gunanya dalam rangka mentransformasikan pikiran dalam tindakan untuk menjangkau pembaca yang lebih luas. Buku ini bukan yang pertama lahir dari rahim perguruan tinggi keagamaan, namun ia merupakan buku pertama lahir di PTKKN tentang generasi milenial. Sejarah informasi yang dapat kita jangkau, terdapat 3 buku yang lahir sebelumnya di PTKIN yang dihasilkan melalui riset serius, atas sponsor UNDP, Program Convey Indonesia, dengan PPIIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku pertama adalah *Literatur Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi dan Kontestasi* dengan Noorhaidi Hasan sebagai editor. Buku kedua adalah *Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan* dengan editor Jajang Jahroni dan Irfan Abubakar. Ketiga adalah *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme* dengan Chaider S. Banuulim, Hilman Latief, dan Irfan Abubakar sebagai editor. Sebagai pelengkap dua buku yang disebut terakhir, dan demi mengamankan paham keagamaan generasi milenial, CSRC menerbitkan buku *Literasi Keagamaan: Takmir Masjid, Iman dan Khatib* dengan Irfan Abubakar dan Irfan Hidayat sebagai editor. Buku terakhir ini mengingatkan pada Dinham dan Francis bahwa literasi keagamaan itu berpengaruh besar pada kebijakan dan praktiknya. Juga Prothero, bahwa ada publik Amerika Serikat yang menghendaki adanya literasi keagamaan dan ada yang tidak.

Karena satu dua hal, buku-buku di atas memicu - langsung maupun tidak langsung terhadap - diselenggarakannya Simposium Nasional Agama Generasi Milenial di IAKN Manado pada 2018 yang hasil-hasilnya diterbitkan menjadi buku ini. Motivasi mendasarnya adalah memperkaya diskursus dan jawaban terhadap berbagai isu menyangkut generasi milenial dan menabur amal jariah - perbuatan baik di mana pahalanya terus mengalir pada setiap buku ini dibaca dan dimanfaatkan.



RAJAWALI PERS

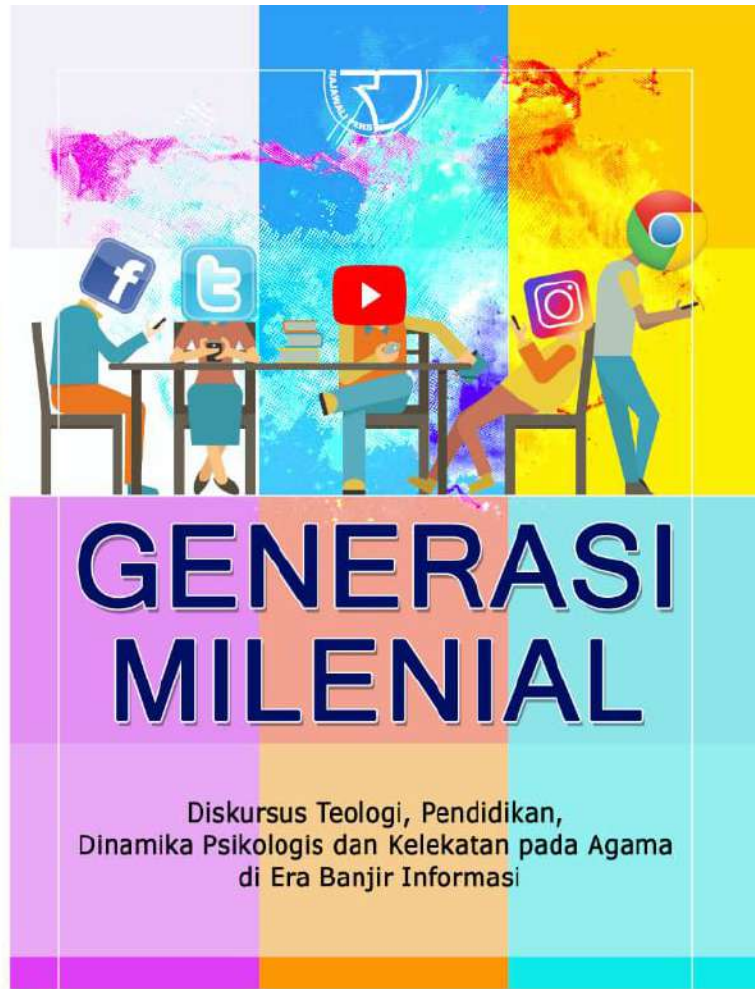
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



Diskursus Teologi, Pendidikan,
Kelekatan pada Agama di Era Banjir Informasi

GENERASI MILENIAL

Jeane Marie Tulung | Achmad Syahid
Yanice Janis | Yan O Kalampung



GENERASI MILENIAL

Diskursus Teologi, Pendidikan,
Dinamika Psikologis dan Kelekatan pada Agama
di Era Banjir Informasi

Jeane Marie Tulung | Achmad Syahid | Yanice Janis | Yan O Kalampung

Generasi Milenial

Diskursus Teologi, Pendidikan, Dinamika Psikologis
dan Kelekatan pada Agama di Era Banjir Informasi

Generasi Milenial

Diskursus Teologi, Pendidikan, Dinamika Psikologis
dan Kelekatan pada Agama di Era Banjir Informasi

Jeane Marie Tulung | Achmad Syahid | Yanice Janis | Yan O Kalampung



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Jeane Marie Tulung, Achmad Syahid, Yanice Janis, Yan O Kalampung

Generasi Milenial: Diskursus Teologi, Pendidikan, Dinamika Psikologis dan Kelekatan pada Agama di Era Banjir Informasi/Jeane Marie Tulung, dkk
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.

cxiv, 336 hlm., 23 cm.

Bibliografi: ada disetiap bab

ISBN 978-623-231-183-1

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.2471 RAJ

Jeane Marie Tulung, Achmad Syahid, Yanice Janis, Yan O Kalampung

GENERASI MILENIAL

Diskursus Teologi, Pendidikan, Dinamika Psikologis dan Kelekatan pada Agama di Era Banjir Informasi

Cetakan ke-1, September 2019

Diterbitkan atas kerjasama dengan IAKN Manado Press

Editor : Jeane Marie Tulung, Achmad Syahid, Yanice Janis, Yan O Kalampung

Setter : Tim Kreatif RGP

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinguung, No.112, Kel. Leuwinguung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinguung No. 112, Kel. Leuwinguung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor	v
Sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	xi
Pengantar Editor	xv
Identitas Demografis, Dinamika Psikologis dan Isu-Isu Keagamaan Generasi Milenial	
Diskursus Agama dan Teologi	
Mengapa Generasi Milenial Perlu Belajar Sejarah Perdamaian Atas Nama Agama?	3
Misbahuddin Yan O. Kalampung	
Pandangan Beragama Generasi Milenial dalam Ruang Virtual	15
Lilly Yulia Wasida	
Religiositas Generasi Milenial: Tantangan Bagi Kehidupan Beragama dari Perspektif Kristiani	35
John Titaley	
Aku Online, Maka Aku Ada: Menggugat Eksistensi Generasi Milenial Dalam Media Sosial Berdasarkan Perspektif Spiritualitas Kristen	47
Daniel Syafaat Siahaan	
Citra Diri Pendeta GMIM Bagi Generasi Milenial	73
Deyvi J. L. Tumundo Marselino C. Runturambi	

Liturgi Kontekstual Berbasis Multikultural Bagi Generasi Milenial di IAKN Manado	85
Meily Meiny Wagiu Jekson Berdame	
Gereja, Politik, dan Generasi Milenial	103
Anita Inggrith Tuela	
Santri dan Politik Multikulturalisme di Indonesia	117
Almunauwar Bin Rusli	

Diskursus Pendidikan dan Teknologi

Tantangan Guru Pendidikan Agama Kristen di Era Revolusi Industri 4.0	137
Olivia Cherly Wuwung Paultje P. Tampa	
Strategi Pembelajaran Berbasis <i>Hots</i> Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen	151
Heldy Jerry Rogahang Wolter Weol Jefri Mailool	
Media Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di Era Milenial	171
Deflita R. N. Lumi	
Pola Asuh Anak Usia Dini Versi Orang Tua Milenial	179
Febri Kurnia Manoppo	
Strategi PAK Generasi Milenial dalam Konteks Penggunaan Media Sosial di Manado	197
Rolina A.E Kaunang	
Pancasila Dalam Ruang Publik di Era Milenial	213
Karya Nusa Riung	
PAK Generasi Milenial dalam Menghadapi Hoax: Kajian Pemikiran Paulo Freire	227
Yanice Janis Merensiana Hale	

Diskursus Pastoral Konseling dan Psikologi

Kesulitan Belajar Generasi Milenial di Program Studi Pastoral Konseling IAKN Manado	241
Shanti Natalia Christie Ruata Novita Pardamean Sianturi	

Ibadah Generasi Milenial: Pendekatan Teologi Pastoral Konseling Yohan Brek	249
Diskursus Musik dan Gaya Hidup	
Selera Musik Gerejawi Generasi Milenial Alvik Lopian	267
Kebiasaan Tingkah Laku Menyanyi Setelah Ibadah Syukur atau Duka Pada Kalangan Generasi Milenial Masyarakat Kristen di Manado Charles P.N. Rembang Hesky Ch. Opit Yunita Sumakul	291
Gaya Hidup Dosen Generasi Milenial dan Eksistensi Mereka di Media Sosial: Studi Kasus di Institut Agama Kristen Negeri Manado Farno Arthur Gerung Melissa MF Waturandang Marssell Michael Sengkey	335
Tentang Penulis dan Editor	321



GEREJA, POLITIK, DAN GENERASI MILENIAL

Anita Inggrith Tuela

PENDAHULUAN

Gereja ditempatkan di dunia, tapi bukan berasal dari dunia. Ini memberi pengertian bahwa kehadiran gereja di tengah dunia adalah berkait erat dengan peran kenabiannya. Bahwa gereja diminta oleh Tuhan untuk turut berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan bangsa termasuk dalam kehidupan dan lapangan politik. Sebagai yang bukan berasal dari dunia, maka itu artinya keterpanggilan gereja di tengah dunia tentulah “lain daripada yang lain”. Pengutusan gereja oleh Kristus disertai dengan adanya ‘pimpinan dan pertolongan’ oleh Roh Kudus. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus pulalah gereja dipanggil masuk ke dalam dunia dan berpengapa bagi dunia.

Sebagai Tubuh Kristus, maka gereja pun harus dipahami dari segi organisasinya. Sebuah organisasi yang berbeda dari organisasi sosial kemasyarakatan lain yang ada. Sebagai organisasi maka gereja memiliki wibawa ilahi yang didapatnya dari Kristus (Mat 28). Pengutusan gereja oleh Kristus disertai dengan adanya ‘pimpinan dan pertolongan’ oleh Roh Kudus. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus pulalah gereja dipanggil masuk ke dalam dunia dan berpengapa bagi dunia. Gereja (warga gereja) tentunya akan terus bergumul dengan segenap kesehariannya termasuk kehidupan politik.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara RI, tahun 2019 meru-

pakan momentum politik yang penting. Di mana di tahun 2019 terdapat agenda besar bangsa yang akan dilaksanakan yakni, Pemilu Capres-Cawapres, serta Pemilu legislatif. Pemilu sendiridiadakan dalam rangka mewujudkan suatu negara demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas. Dengan demikian Pemilu dapat dikatakan sebagai sarana demi terwujudnya demokrasi. Pemilu 2019 yang akan memilih Capres-Wapres serta anggota DPD, DPR dan DPRD, bila terpilih nanti akan menjalankan pemerintahan dan sekaligus arah politik bangsa Indonesia. Setiap WNI mempunyai hak untuk memilih tetapi regulasi, dalam hal ini UU Pemilu, memuat aturan pembatasan umur, yakni 17 tahun ke atas atau sudah kawin. Umur 17 tahun atau sudah kawin, dimengerti oleh UU No. 7 Tahun 2017, sudah mempunyai tanggung jawab politik terhadap negara dan masyarakat. Untuk hal ini, maka sangatlah dimengerti bila setiap WNI yang berumur 17 tahun dan sudah kawin untuk berpartisipasi dalam bidang politik, salah satunya melalui Pemilu. Itu artinya, generasi milenial, yang juga merupakan warga negara dan sesuai regulasi UU, mempunyai hak untuk ikut memberikan suara dalam Pemilu, sebagai bagian dari tanggung jawab politiknya untuk menunjukkan partisipasi politik.

POLITIK DAN SISTEM POLITIK

Para pakar politik menyebut ilmu politik sebagai ratunya ilmu-ilmu sosial, dan berkedudukan pada peringkat paling atas atau utama di antara ilmu-ilmu sosial. Bagi Aristoteles, politik merupakan hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Oleh karenanya maka,

politik pada hakikatnya adalah bagian daripada umat manusia yang tidak bisa dipisahkan dari keterpaduannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Baik secara sadar maupun tidak sadar tiap manusia melakukan hal-hal yang bersifat politik, serta berada dalam lingkungan yang disebut 'sistem politik'. Politik tidak secara otomatis sama dengan ilmu politik. Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Secara harfiah arti kata polis adalah kota, dan dari arti ini berkembanglah berbagai pengertian.

Pembagian yang dilakukan ahli terhadap politik, yaitu politik sebagai ilmu, dan politik sebagai filsafat. Ilmu politik adalah mempelajari gejala (fenomena) politik,

¹ T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Dan Kegunaannya* (Bandung: Refika, 2009), h. 1

menyangkut hal-hal dasar yang terdapat di dalam interaksi makhluk hidup dan kehidupan masyarakat. Adapun hal-hal mendasar yang ada dalam kehidupan manusia, yaitu perjuangan untuk kekuasaan (*struggle for power*), atau minimal perjuangan untuk hidup (*struggle for life*) di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Selain itu karena ilmu politik mempelajari negara dan pemerintahan yang merupakan organisasi pada peringkat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bagi umat manusia. Adapun pengertian politik sebagai filsafat, selain mengacu pada persoalan fundamental, hakikat dan tujuan-tujuan ideal negara, juga menyimak persoalan fungsi yang benar dari pemerintah dan batas-batas kekuasaannya yang tidak hanya pada individu, tetapi juga terhadap keluarga, lembaga-lembaga keagamaan dan institusi-institusi lainnya. Di dalam konteks inilah Charles William Hendel menyatakan bahwa pertanyaan utama yang muncul dalam filsafat politik adalah menyangkut alat kontrol yang pas. Disamping persoalan kontrol tersebut adalah, konsepsi menyangkut negara merupakan substansi yang senantiasa menjadi pengkajian filsafat politik². Pengertian yang lebih bersifat operasional menyangkut politik, tanpa mempersoalkannya sebagai ilmu atau filsafat datang dari Karl Deutch. Baginya politik, entah itu menyangkut negara atau pemerintah atau manusia, adalah sebagai pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat. Rumusan lain lagi diangkat oleh S.E. Fine, dalam tulisannya “Comparative Government”, yang dikutip Saut Sirait, yang berangkat dari realitas negara-negara modern dan kompleks, melihat bahwa dengan pelbagai warna dan kepentingan yang beragam, bahwa politik adalah gumpalan keputusan yang membuat tiap orang atau kelompok berada pada konflik keputusan³. Dengan melihat pengertian dan batasan-batasan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa politik merupakan suatu kegiatan yang beraneka ragam dalam suatu entitas dan sistem politik (negara) yang mencakup proses penentuan tujuan, pelaksanaan tujuan dengan segala kebijakan-kebijakan umum dan pengaturannya. Politik akan selalu berkenaan dengan kekuasaan, kewenangan dan ketataan. Politik berlangsung pada suatu lingkungan yang disebut dengan “Sistem politik”. Sehingga ilmu politik adalah ilmu yang diterapkan untuk menganalisis interaksi dalam suatu sistem politik. Ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Hal ini oleh The Liang Gie, dilihatnya sebagai kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata, tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru, karena di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah ada.⁴ Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, mencakup: sifat-hakikatnya, dasar landasannya, proses kelangsungannya, luas lingkungannya serta hasil akibatnya. Ini dikarenakan kekuasaan sebagai konsep fundamental dari ilmu politik tidaklah semata-mata identik dengan kekuatan yang memaksa.⁵

² Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia— Suatu Tinjauan Etis*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 23

³ *Ibid.* h. 24

⁴ T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan dan Kegunaannya* (Bandung: Refika 2009) h. 13

⁵ *Ibid.*

Untuk lebih memahami politik adalah penting untuk mengetahui proses awal perkembangan politik, yakni dari Yunani Kuno. Hal ini diperlukan untuk lebih mendalami konsepsi yang berkembang sekaligus menyeruak ke dalam nuansa-nuansa yang harus diakui sangat sulit untuk melihatnya. Salah satu negara kota yang dianggap penting untuk diperhatikan adalah Atena, suatu kota yang berada di Yunani. Pentingnya Yunani dalam konteks politik disebabkan oleh kelengkapannya bagi suatu masyarakat yang bernegara. Kota ini telah memiliki sistem yang mumpuni seperti perundang-undangan, sistem dan kelembagaan politik, walau masih dalam cara yang sederhana yang dipergunakan warga kota untuk menyalurkan kegiatannya di lapangan pemerintahan. Atena diperkirakan telah memiliki konstitusi sebelum abad ke-5 SM. Bukti sejarah menunjukkan adanya perubahan dan perbaikan yang dilakukan terhadap konstitusi, yang diajukan oleh Cleisthenes dan diterima pada tahun 507 SM. Itu artinya sebelum waktu itu Athena telah memiliki konstitusi yang belum diperbaiki itu. Lembaga politik yang paling menarik di Athena adalah Sidang Ecclesia dan Dewan Limaratus. Sidang Ecclesia adalah semacam dewan rakyat dalam arti dan bentuknya yang real, setiap laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas wajib menghadiri sidang. Tugas sidang adalah membuat undang-undang dan melakukan persidangan sepuluh kali dalam satu tahun. Tugas sidang ini sangat mirip dengan dewan legislatif di negara-negara modern. Sedangkan Dewan Limaratus adalah badan yang berjumlah 500 orang yang merumuskan perencanaan untuk diajukan pada sidang, serta dalam hal-hal tertentu diberi kekuasaan untuk memutuskan dan bertindak atas nama rakyat. Selain dua lembaga politik di atas, maka rakyat Athena juga membentuk yang namanya ‘makhkamah’ dan anggotanya disebut juri dan harus ganjil. Fungsinya, menyeleksi calon, mengatur penempatan, memeriksa secara berkala laporan pekerjaan hakim-hakim, mengawasi pengadilan dan keputusan-keputusan dewan. Kota Athena juga memiliki perangkat militer yang disebut Dewan Jenderal, merupakan pejabat-pejabat militer yang berfungsi dalam pengamanan termasuk untuk yang bersifat ekonomis.⁶

Dari paparan politik Athena kuno, sudah dapat dipahami bahwa di negara kota Athena perwujudan kedaulatan rakyat yakni, dari rakyat,

⁶ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), h. 25-29

oleh rakyat, dan untuk rakyat benar-benar dilaksanakan demi tercapainya cita-cita bersama.

Untuk lebih memahami pengertian politik, maka akan diuraikan beberapa sistem politik.

Demokrasi

“Definisi demokrasi yang paling ringkas tapi memiliki makna yang paling dalam dan terbaik diberikan Abraham Lincoln melalui pidatonya di Gettysburg tahun 1863, yakni: *government of people, by people, for the people* (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Dalam demokrasi, esensinya adalah bahwa rakyat yang mengatur. Itu berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.” Penekanan yang utama dalam demokrasi adalah persetujuan rakyat.

Konstitusi sebagai pelembagaan demokrasi di setiap negara merupakan faktor yang sangat fundamental. Prinsip lain yang paling mendasar dalam demokrasi adalah pengakuan terhadap kesetaraan. Demokrasi sangat menekankan penghargaan atas individu dan harkat manusia.

Aristokrasi

Aristokrasi (Yunani: *aristos*, berarti *the best*, terbaik dan *cratos* yang memerintah), saat ini lebih banyak dikenakan kedalam strata sosial ketimbang politik. Prinsip yang mendasari aristokrasi adalah kesadaran tentang adanya kecakapan yang berbeda dan keyakinannya bahwa tidak semua orang dapat memerintah. Berangkat dari pemahaman ini maka proses yang terjadi pada suatu negara tidak tergantung pada sistem, tetapi pada kecakapan, kejujuran, kapasitas atau kemampuan pada pemimpin. Aristokrasi sangat percaya dan menggantungkan diri pada figur dan bukan pada sistem. Monarki (Yunani: *monarchia*, dari kata *monos* tunggal, dan *arche*, artinya memerintah) merupakan sistem yang sangat tua dalam tatanan kenegaraan di dunia. Dalam bentuk monarki murni, pada diri seorang raja atau penguasa menggumpal supremasi kekuasaan dan kewenangan dalam pembuatan undang-undang, pengaturan administrasi dan kekuasaan pengadilan, dan karenanya ia sangat berkuasa mutlak. Sistem pengaturan pergantian (suksesi) raja pada monarki adalah berdasarkan keturunan.

Secara historis, sistem dan tradisi monarki merupakan realitas yang sangat dekat dengan gereja. Bahkan dalam perkembangan berikutnya, monarki itu dikaitkan dengan gereja, khususnya pada masa

kepausan di abad 13. Kepada sistem pengaturan gereja sempat disebut dengan “the papal monarchy”. Pembaruan (reformasi) dalam gereja menjadi awal keruntuhan sitem monarki langsung ataupun tidak langsung. Sistem monarkhi semakin mengalami kehancuran ketika revolusi Inggris tahun 1688, dan revolusi Perancis tahun 1789. Meskipun ada beberapa negara yang mempertahankan sistem monarkhi tapi monarkhi tersebut telah begitu dibatasi (*constitutional monarchy*) atau monarkhi terbatas.⁷

GEREJA DAN POLITIK

Dalam hal hubungan Gereja dan Politik, beberapa poin penting untuk dilihat.

Suatu penelitian yang dengan tegas menyimpulkan adanya korelasi yang utuh antara agama dengan politik, termasuk sosial dan ekonomi diungkapkan oleh Arend van Leeuwen. Konsepsi budaya dan politik yang ada di kota-kota tua, ternyata tidak lepas dari tradisi keagamaan. Bahkan bangunan-bangunan fisik pada pusat-pusat budaya dan politik merupakan pencerminan dari konsepsi terhadap Tuhan. Penelitiannya terhadap Babilonia misalnya, memberi keyakinan bagi van Leeuwen untuk menyimpulkan korelasi yang sangat erat antara tradisi keagamaan dengan konsepsi budaya dan politik. Keistimewaan-keistimewaan budaya dan politik yang membanggakan Babel sebagai pusat dunia, berakar dalam konsepsi agama sebagai pusat bumi dan gunung kosmis sebagai titik tumpu alam semesta.⁸

Melalui penelitiannya yang luas pada sejarah, budaya, dan konsepsi-konsepsi tua agama, Leeuwen dengan yakin menegaskan status agama yang memiliki kedaulatan yang tinggi dalam politik. Hal itu tidak terlepas dari totalitas kosmis yang sangat keras di dalam konsepsi-konsepsi keagamaan kuno. Konsepsi totalitas kosmis inilah yang perlu dilihat secara kritis pada bidang politik. Ketika agama memberikan legitimasi politis kepada kedaulatan yang diwakili negara, maka kekuasaan yang mencakup makna segala kehidupan menjadi realitas politik itu sendiri.⁹

Makna agama sebagai sesuatu yang memberi pengaruh di dalam kehidupan manusia merupakan kenyataan yang tidak terabaikan. Sejarahwan dunia, Arnold Toynbee, dengan tegas menyatakan bahwa semua peradaban yang masih berlaku, secara mendasar berorientasi keagamaan dan karena itu berangsur-angsur, tetapi sangat nyata,

⁷ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), h. 29-38

⁸ Arend Th. Van Leeuwen, *Agama Kristen dalam Sejarah Dunia*, terj: Frits M. Kiriho, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), hlm. 13

⁹ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), h.70

menyajikan pemecahan-pemecahan keagamaan juga terhadap sejumlah masalah organisasi sosial politik.

Politik Teokrasi

Di dalam situasi dan kondisi primitif, konsepsi kekuasaan yang oleh ketidakjelasan mengenai hakikatnya dan berada di luar diri manusia, membuat kekuasaan itu menjadi absolut. Dalam banyak hal pemahaman mengenai kekuasaan yang absolut diletakkan pada *other things/spiritual beings* itulah sebenarnya (sadar atau tidak), yang kemudian bergerak menuju pada suatu penyempurnaan konsepsi yang disebut teokrasi. Oleh pergerakan pemikiran yang lebih maju termasuk keinginan untuk membuat perhitungan dan kontrol, konsepsi politik untuk melokalisasi kekuasaan itu.

Bagi paham monoteis, teokrasi akan sangat jelas, berhubung penguasanya adalah tunggal, meski dengan pelbagai sifat dan hakikatnya yang khas. Kepastian mengenai hakikat dan sifat dan dalam monoteisme itu sendiri akan mencirikan suasana, kondisi, nilai dan bila mungkin sistem dari teokrasi itu sendiri. Di dalam perspektif inilah sesungguhnya pemahaman mengenai teokrasi digali dan dirumuskan secara jelas.

Bila merujuk pada realitas Alkitab, maka konsepsi politik teokrasi tidak mengarah pada suatu pemerintahan raja-dewa seperti yang ada dalam ontokrasi. Tuhan menjadi penguasa tunggal dan manusia berada dalam kekuasaanNya yang dimanifestasikan melalui hukum-hukumnya yang pasti dan kekal. Istilah yang digunakan adalah “kerajaan imamat”, yang dengan tegas dinyatakan untuk pertama kali kepada Musa:

kamu akan menjadi kerajaan imamat dan bangsa yang kudus (Kel 19:6).¹⁰ Menarik untuk diperhatikan bahwa bangsa pilihan Allah, yaitu Israel, tidak terutama disebut sebagai “bangsa” melainkan “umat”. Bahkan dengan cukup tajam PL membedakan antara Israel sebagai “umat Allah” (= am YHWH) dengan “bangsa-bangsa” (*goyim*). “Umat” menekankan kesamaan kedudukan antar manusia, yang satu tidak menguasai atau mengatasi yang lain, oleh karena semuanya diikat oleh ketaatan hanya kepada Allah saja. Beberapa ahli PL, menyimpulkan bahwa “umat” adalah sebuah “masyarakat teokratis yang demokratis”.¹¹ Di dalam “kerajaan imamat” para imam bukanlah representasi atau personifikasi Tuhan di dalam kekuasaan politik.

¹⁰ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), h. 81

¹¹ Weinata Sairin., J.M Pattiasina., *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak Azasi Manusia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), h. 14

GENERASI MILENIAL (GEREJA) DAN PARTISIPASI POLITIK

Generasi Milenial memang mendesak untuk terlibat dalam persoalan politik.

Partisipasi politik dari generasi milenial semakin dituntut untuk mempersiapkan diri terjun ke dunia politik. Inu Kencana Sja'fii, dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengatakan kondisi perpolitikan Indonesia saat ini sangat memerlukan keterlibatan generasi baru, dalam hal ini generasi milenial, agar politik di Indonesia semakin membaik.¹² Posisi generasi milenial saat ini sangat diperhitungkan sebab generasi milenial adalah bagian dari penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih yang masuk dalam kategori generasi milenial mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih, sekitar 35 - 40 persen. Jumlah sebanyak ini sudah tentu memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu dan menentukan siapa pemimpin pada masa mendatang¹³.

Menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang bisa dilakukan oleh generasi milenial walaupun hal ini bukanlah satu-satunya cara dan bisa dibilang pasif. Cara lain ialah dengan mencalonkan diri dalam kontestasi politik pada pemilu 2019 dan siap memberikan semua usaha terbaiknya jika terpilih nanti. Akan tetapi generasi milenial pada umumnya bersikap apatis dan bahkan menganggap politik adalah sesuatu yang kotor. Hal ini ditunjukkan generasi milenial, yang mungkin lahir di era teknologi, menjadi orang peduli dengan keadaan sekitar, termasuk politik. Berbeda dengan generasi *X* dan *Baby Boomers* yang telah melewati dan merasakan masa-masa pergolakan politik pada pertengahan abad 20.

Seperti yang diberitakan Harian Kompas.com pada Januari 2018, *Alvara Research Center* (ARC) mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan bahwa generasi milenial cuek terhadap politik. Hal ini tergambar pada segmentasi pemilihan di Indonesia yang terbagi 4 yakni rasional, konservatif, swing dan apatis, pemilih milenial paling banyak berada di pemilih yang apatis dan swing indikatornya terlihat pada perbincangan generasi milenial yang berbincang asik tentang musik, fitur, olah-

¹² Inu Kencana Syafii, "Kiprah Generasi Milenial Dalam Politik Semakin Dibutuhkan". Berita - Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, (20 March 2018)

¹³ "Peran Generasi Milenial dalam Menentukan Kemenangan di PILPRES 2019", Berita - Matamata Politik, September 13, 2018

raga dan teknologi informasi dari pada tentang politik. Padahal semua hal yang saat ini digandrungi oleh generasi milenial tidak akan pernah bisa dinikmati tanpa adanya politik. Mulai dari hal sederhana seperti makanan yang dikonsumsi sehari-hari sampai pada hal yang rumit seperti teknologi informasi dan komunikasi merupakan bentuk pencapaian dalam bidang politik oleh pemerintah.¹⁴ Oleh sebab itu sikap apatis generasi milenial terhadap politik, sementara mereka menikmati hal-hal yang dicapai melalui politik, merupakan hal yang tidak masuk akal.

Sikap apatis generasi milenial terhadap politik berlaku umum dan termasuk didalamnya generasi milenial gereja. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi gereja dalam partisipasinya di bidang politik, dan gereja tidak bisa menutup mata atas hal ini. Generasi milenial gereja adalah bagian dari domba-domba (warga gereja) yang menjadi tanggungjawab gereja, dan politik adalah ladang pelayanan yang tidak boleh diabaikan. Usia pemuda gereja (18-30 tahun), merupakan bagian dari generasi milenial sedangkan politik merupakan realitas yang ada dan harus dihadapi oleh warga gereja. Dilapangan politik, gereja mempunyai misi menghadirkan kehendak Allah di tengah dunia. Generasi milenial gereja, seperti juga warga gereja lainnya di NKRI ini pada hakikatnya mempunyai “kewargaan rangkap”. Bahwa selain warga gereja (orang Kristen), tetapi sekaligus juga sebagai warga negara Indonesia. Disinilah identitas agama berkaitan dengan identitas kebangsaan. Politik adalah strategi di mana gereja (orang Kristen) terpenggil untuk mendemonstrasikan kasih dan pemeliharaan Allah. Dr. G.S.S.J Ratulangi yang adalah pahlawan nasional asal Minahasa, juga seorang Kristiani, yang menurut Klinkert, sebagaimana dikutip oleh Basri Amin, menyatakan bahwa Sam Ratulangi yang adalah sumber inspirasi orang Minahasa, telah mengingatkan tentang peran politik yang harus dimainkan oleh orang Minahasa baik di tingkat nasional maupun Internasional. Selain itu Sam Ratulangi pun melihat bahwa kesatuan politik itu penting dalam rangka kesatuan ideologi.¹⁵ Hal ini pulalah yang membuat Sam Ratulangi menjadi tokoh Kristen yang nasionalis. Nilai-nilai demokrasi dalam gereja secara khusus, GMIM (Gereja Masehi Injili

¹⁴ “Milenial Cuek Terhadap Politik”, Berita – Harian Kompas.Com, Januari 2018

¹⁵ Basri Amin, “Ethnic Identity in Colonial and Postcolonial Politics: The Case of Minahasa, Eastern Indonesia”, *Journal of Asia Pacific Studies*, Vol. 2 No. 3, (2012), p. 329

di Minahasa) dari artikel yang ditulis David Henley, Maria Schouten, dan Alex J. Ulaen, dengan judul “Preserving the Peace In Post – New Order Minahasa”, bahwa peran gereja (baca: GMIM) dalam politik sangat terlihat. Hal ini dikarenakan sebagai gereja yang memiliki tiga per empat populasi penduduk Minahasa, kontribusi GMIM memainkan peran yang penting. Di mana, bahkan untuk mendapatkan posisi politis sebagai Gubernur Sulawesi Utara, haruslah mempunyai hubungan yang baik dengan GMIM. Selain itu mereka menyatakan, dalam tata kelola organisasi dan disiplin, pengelolaan GMIM melebihi negara. Hal ini diindikasikan bahwa dalam pemilihan pejabat gereja kaum awam di lingkungan GMIM, mendekati prosedur yang benar-benar demokratis.¹⁶Bila melihat hal ini maka dapatlah dikatakan bahwa keberadaan lembaga gereja untuk berpartisipasi dalam bidang politik sudah ditempuh gereja, bahkan hal “berdemokrasi” bukanlah hal baru dalam hidup bergereja, karena sudah dilakukan gereja berkait dengan penatalayanannya. Sehingga yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran generasi milenial gereja untuk dapat berpartisipasi dalam politik.

Dalam usaha untuk membangkitkan minat generasi milenial gereja terhadap politik dan meningkatkan partisipasi mereka dalam politik, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah meluruskan pemahaman generasi milenial yang keliru mengenai politik. Dengan harapan bahwa setelah memahami apa itu politik dapat melepaskan stigma negatif politik dalam perspektif generasi milenial.

Membahas tentang apa itu politik memang bukanlah hal yang sederhana. Para ilmuwan politik bahkan belum bisa mendefinisikannya secara objektif. Namun, satu hal yang perlu ditekankan di sini ialah bahwa politik bukanlah “barang kotor” yang harus dijauhi. Benar bahwa berbagai konflik berdarah, penindasan, genosida, dan berbagai bencana kemanusiaan yang terjadi dalam sejarah merupakan buah dari kebijakan politik suatu pemerintahan. Akan tetapi tidaklah bijaksana jika politik mendapatkan cap negatif karena hal ini. Yang berpolitiklah yang salah dan mungkin memiliki tujuan yang jahat sejak semula. Di samping

¹⁶David Henley, Maria. J Schouten, Alex J. Ulaen., “ *Preserving the Peace In Post – New Order Minahasa*”, in *Renegotiating Boundaries – Local Politics In Post – Soeharto Indonesia.*, Ed. Henk Schoutlje – Nordholt and Gerry van Klinken (Leiden: KITLV Press, 2007), p. 311-312

itu banyak hal positif yang telah dicapai lewat politik. Contoh-contoh konkretnya ialah kestabilan ekonomi negara, situasi sosial-religius yang bebas konflik, dan kemajuan di bidang teknologi informasi merupakan hal-hal positif yang dicapai melalui politik.

Mengapa Gereja Perlu Berpolitik

1) Allah yang “berpolitik”

Dalam peristiwa exodus Allah bertindak secara politis di dunia, dengan menjadikan satu kelompok budak menjadi suatu bangsa, memberi tanah air, memberi hukum dan mengangkat pemimpin. Orientasi politik Allah adalah membela rakyat yang ditindas penguasa Mesir. Bahkan dalam pengalaman Israel yang selanjutnya Allah mengangkat juru bicaranya (para nabi), atas nama Allah mengkritik para raja dan membela rakyat yang tertindas.

2) Yesus Kristus yang “berpolitik”

Saat Yesus tampil dalam pelayanan-Nya, Ia memberitahukan bahwa misi-Nya adalah pembebasan bagi orang kecil dan tersisih. Tokoh sentral dalam kekristenan ini melaksanakan pelayanan-Nya dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun dan telah memberikan pengaruh yang besar bagi peradaban manusia hingga kini. Kisah pelayanannya yang tercatat dalam empat kitab Injil kanonik memperlihatkan manuver-manuver politik yang cerdas dan bertanggungjawab. Pendekatan-Nya terhadap kaum-kaum yang termarjinalkan seperti pemungut cukai, orang-orang miskin, dan penderita kusta menunjukkan manuver politik-Nya yang hendak melawan sistem bait Allah dengan para imam yang dipandang oleh Yesus sebagai penyebab penderitaan masyarakat. Hal ini semakin terlihat menjelang kematian-Nya ketika dengan berani Yesus masuk dalam kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai pada perayaan Paskah. Di sini dapat dikatakan bahwa politik yang dilakukan oleh Yesus merupakan politik etik yang dilakukan-Nya dengan berani dan kemantapan hati.

3) Gereja yang “berpolitik”

Istilah gereja berakar dari kata ekklesia, yang adalah istilah politik dalam praktek demokrasi Yunani kuno. Ekklesia, yang dimaksud

adalah pertemuan rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politis menyangkut kehidupan bersama dalam polis, misalnya: memilih pemimpin atau penentuan kebijakan-kebijakan dasar dalam polis. Paulus dan penulis PB lainnya mengambil istilah ini dan mengenakannya pada komunitas Kristen tentu ada maksudnya bahwa dalam gereja, haruslah dipahami sebagai pertemuan umat dengan kepala-Nya yakni Kristus dan karena ekklesia adalah pertemuan umat maka gereja (ekklisia) seharusnya pula memberlakukan prinsip-prinsip ekklesia politis, seperti prinsip demokrasi.

Dari segi ini kehidupan gereja perlu menjadi model kehidupan demokrasi yang bisa mengajari mereka yang di luar gereja tentang nilai-nilai demokrasi. Sehingga tepatlah apa yang dikatakan oleh John W. de Gruchy, bahwa merupakan suatu kemustahilan untuk kita memahami misi gereja terpisah dari sebuah tatanan dunia yang adil atau untuk mempertimbangkan peran gereja kecuali dalam relasi dengan kebutuhan dan kepedulian atas kemanusiaan dan ciptaan sebagai satu kesatuan.¹⁷

Singkatnya kesaksian Alkitab, mengungkapkan tentang bagaimana kehendak dan tindakan Allah yang berpihak kepada “mereka yang termarjinalkan”, yang kesemuanya dalam rangka memulihkan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang seharusnya menjadi alasan utama mengapa sebagai warga gereja terpanggil untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Dan warga gereja, generasi milenial, juga turut didalamnya.

KESIMPULAN

Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa generasi milenial cenderung tidak peduli dengan dunia politik, serta memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap politisi dan juga sinis terhadap berbagai lembaga politik dan pemerintahan. Padahal dengan kehidupan mereka yang selalu bersinggungan dengan gadget (*high-tech*), sebenarnya akan memudahkan mereka untuk melakukan banyak hal yang berhubungan dengan keterpanggilan mereka selaku warga gereja di dunia politik. Permasalahannya, adalah bahwa politik sudah terasosiasi sebagai sesuatu

¹⁷ John W. de Gruchy, *Agama Kristen dan Demokrasi – Suatu Teologi Bagi Tata Dunia yang Adil*, terj. Martin Lukito Sinaga, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), h. 295

yang “kotor”, sehingga harus dihindari. Selain itu, politik sudah melekat dengan perebutan kekuasaan, uang dan jabatan. Hal inilah yang salah satunya membuat generasi milenial “menjauhi” dunia politik.

Padahal, mengambil sikap “cuek” atau tidak peduli ini, secara tidak langsung akan membuat kondisi politik menjadi semakin buruk. Hal ini dikarenakan, mereka yang berkiprah di panggung politik, bahkan yang memegang “kekuasaan”, bukanlah yang mereka yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta kepedulian terhadap bangsa ini, melainkan mereka yang niat awalnya, hanya untuk memperoleh kekuasaan demi memperkaya diri dan keluarganya. Padahal politik sesungguhnya adalah alat mendapatkan kesejahteraan. Disinilah dibutuhkan peran dari generasi milenial untuk “mengambil langkah berani untuk berkiprah di dunia politik, dan bertindaklah sebagai “agen perubahan”.

Adapun langkah nyata generasi milenial sebagai agen perubahan yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

- Gerakan anti golput dengan kampanye *hashtag* demi pemilu berkualitas
- Gerakan *anti hoax*
- Memberi suara dalam Pemilu

Langkah lebih berani lagi adalah dengan masuk dalam arena kekuasaan. Generasi milenial yang pada dasarnya menyukai “challenge”, maka di sinilah tantangannya. Berani tampil beda. Beda dalam motivasinya yakni ada dalam panggung politik karena terpanggil menjawab panggilan sebagai gereja di tengah dunia, termasuk dunia politik. Mengingkari panggilan ini sama halnya dengan “ikut bertanggung jawab” atas keterpurukan dan kegagalan bangsa ini dalam menghadirkan kesejahteraan, nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, B., “Ethnic Identity in Colonial and Postcolonial Politics: The Case of Minahasa, Eastern Indonesia”, *Journal of Asia Pacific Studies*, Vol. 2 No. 3, 2012.

Campbell-Nelson, John, Julianus Mojau, Zakaria J. Ngelow (eds), *Teo-*

- logi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru*, Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013.
- de Gruchy, John W., *Agama Kristen dan Demokrasi – Suatu Teologi Bagi Tata Dunia Yang Adil*, terj. Martin Lukito Sinaga. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Henley., D, Maria. J Schouten, Alex J. Ulaen, “Preserving the Peace In Post – New Order Minahasa”, in *Renegotiating Boundaries – Local Politics In Post – Soeharto Indonesia*, Ed. Henk Schoultje – Nordholt and Gerry van Klinken., Leiden: KITLV Press, 2007.
- Leeuwen, Arend, Th. Van, *Agama Kristen dalam Sejarah Dunia*, terj: Frits M. Kiriho, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Lugo, Gunche, *Manifesto Politik Yesus*, Yogyakarta: ANDI, 2013.
- Singgih, Emanuel Gerrit, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Sirait, Saut, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Syafii, Inu Kencana, “Kiprah Generasi Milenial Dalam Politik Semakin Dibutuhkan”. Berita – Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 20 March 2018
- Rudi, T. May, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Dan Kegunaannya*, Bandung: Refika 2009,
- Sairin, Weinata, Pattiasina J.M., *Hubungan Gereja dan Negara Dan Hak Azasi Manusia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996
- “Peran Generasi Milenial dalam Menentukan Kemenangan di PIL-PRES 2019”, Berita – Matamata Politik, September 13, 2018
- “Milenial Cuek Terhadap Politik”, Berita – Harian Kompas.Com, Januari 2018.



Alrik Lapien lahir di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 17 November 1979. Menyelesaikan studi Musik Gerejawi di STT Abdiel Ungaran (S1) dan melanjutkan pendidikan pascasarjana (S2) bidang Penciptaan dan Pengkajian Musik di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Dosen pada Program Studi Pendidikan Musik Gereja Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen dengan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado (2018-sekarang). Aktif dalam berbagai kegiatan musik gerejawi sebagai Ketua Komisi Musik Gereja GMIM Bukit Hermon Malalayang, praktisi musik gereja, narasumber workshop dan seminar musik gereja, instruktur/pelatih piano dan paduan suara. Alamat korespondensi alrik.lapien@yahoo.com



Anita Inggrith Tuela, lahir di Manado, pada tanggal 15 Agustus 1974, dari pasangan suami istri, Drs Ameilus Samuel Tuela dan Frida Betsi Rarungkuan, SPd. Merupakan sulung dari dua bersaudara. Menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak GMIM Bethesda Ranotana Manado tahun 1979-1980, dan melanjutkan ke Sekolah Dasar GMIM 10 Manado tamat tahun 1986. Pada tahun 1989 menamatkan pendidikan di SMP Negeri 4 Manado. Tahun 1992, lulus dari SMA Negeri 1 Manado. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dan lulus tahun 1997. Pada tahun 2013 lulus dari Pasca Sarjana Teologi UKIT, dan memperoleh gelar Magister Teologi. Dosen Program Studi Teologi pada Fakultas Teologi pada di Institut Agama Kristen Negeri Manado (dulu STAKN Manado) bidang Biblika Perjanjian Lama, juga membantu pelayanan sebagai Pendeta GMIM.



Charles Petra Nicolaas Rembang lahir di Poso tanggal 29 November 1961. Bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT). Ia menyelesaikan pendidikan teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT) Malang tahun 1991, menyelesaikan pendidikan psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) tahun 2006,